

KATA PENGANTAR

Dalam revolusi Indonesia untuk kemerdekaan, tidak banyak orang yang demikian kontroversial seperti Sutan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Menengok ke belakang, hal ini hampir tak terelakkan. Walaupun dia hanya untuk masa singkat memegang peranan penting, dari tahun 1945 hingga 1948, pengaruhnya sangat mendalam terhadap jalannya revolusi Indonesia.

Ia penganjur utama dari suatu penyelesaian lewat perundingan dengan pihak Belanda, akan tetapi penyelesaian di bawah pengawasan internasional. Dalam hal ini dia menentang perasaan yang cukup meluas yaitu suatu penyelesaian militer adalah perlu serta mungkin. Seraya memperkirakan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan kedua belah pihak, Syahrir mengenali kelebihan kekuatan militer pihak Serikat. Di pihak lain, pada hematnya, Negeri Belanda tidak mampu melaksanakan suatu peperangan berlarut-larut, dan mengingat kelemahan militer Indonesia yang relatif, kendati pun kita tidak mampu memenangkan sebuah pertempuran tunggal, selama Belanda tidak seluruhnya menghancurkan kekuatan militer kita, maka pada akhirnya kita akan berjaya.

Ada orang-orang yang berpendapat; revolusi nasional untuk kemerdekaan dan revolusi sosial seharusnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Syahrir yang mengakui keperluan kedua hal itu, tetapi juga mengenali realitas keadaan, membuat sebuah pilihan mendasar. Ia memberikan prioritas tertinggi kepada tujuan pertama. Alasan utamanya ialah kemerdekaan itu sebuah tujuan yang dipikul oleh semua orang, sedangkan revolusi perubahan sosial tidak demikian halnya. Perpecahan di antara kita sendiri, akibat memberikan prioritas yang sama kepada revolusi sosial mungkin dapat membahayakan pemeliharaan persatuan nasional yang begitu esensial bagi tercapainya kemerdekaan secara dini. Syahrir menganggap ini suatu prasyarat utama guna menciptakan perubahan-perubahan sosial yang dia juga menganggap perlu.

Indonesia

Bersama Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Komite Nasional/Pusat (KNIP) Syahrir bertanggung jawab atas terwujudnya sistem pemerintahan parlementer dan suatu sistem multipartai, yang kemudian disetujui oleh Presiden Soekarno, walaupun Soekarno mengecamnya pada tahun 1957 waktu melancarkan Konsepsi Presiden.

Terdapat alasan taktis dan strategis bagi keputusan tadi.

Secara taktik, ia adalah sebuah cara guna melenyapkan cacat "Bikinan Jepang" dan "fascisme" yang dilekatkan oleh Belanda, dan pada mulanya juga oleh pihak Serikat, kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini akan meratakan jalan bagi kemungkinan suatu penyelesaian melalui perundingan. Secara strategi, suatu sistem multipartai yang demokratis lebih memungkinkan menjamin dukungan dan peranserta aktif dari banyak golongan yang berbeda-beda serta aliran dalam masyarakat majemuk Indonesia, dibandingkan dengan sistem satu partai. Lagipula partai tunggal nasional Indonesia yang telah didirikan, tidak hanya di mata pihak Sekutu, tetapi juga dalam pandangan banyak pemuda yang bersikap sangat anti-Jepang dan revolusioner, sudah dinodai oleh suatu sejarah kolaborasi dengan Jepang. Suatu demokrasi multipartai mempunyai tambahan keuntungan taktis yaitu sistem demikian tidak memungkinkan Belanda memanipulasikan berbagai golongan minoritas Indonesia untuk tujuan-tujuan Belanda sendiri.

Pertimbangan strategis kedua ialah suatu sistem demokratis akan membuat kita lebih mampu kemudian melawan apa yang menurut hemat Syahrir adalah musuh Indonesia jangka panjang yakni feodalisme dalam berbagai ragam bentuknya dan warisan fascis yang ditinggalkan oleh golongan militer Dai Nippon di kalangan sebagian besar pemuda. Pamflet Syahrir "Perjuangan Kita" mencerminkan keyakinan kuatnya mengenai isu-isu ini, walaupun pada waktu bersamaan menaburkan benih-benih sebagian besar permusuhan yang kelak akan mewabahnya sepanjang hayatnya. Walaupun demikian, timbangan atas prioritas-prioritasnya membawa Syahrir memulihkan Pamong Praja pada tahun 1946, kendati reaksi-reaksi masyarakat yang seringkali keras terhadap tindakan tersebut di berbagai bagian tanah air, berhubungan dengan peranan Pamong Praja selaku para pengumpul beras yang dibenci untuk tentara Jepang dan selaku pemasok romusha, buruh paksaan selama masa peperangan, dan kendati risiko yang dikandung oleh tindakan tadi yaitu dengan cara demikian memulihkan feodalisme yang sangat tidak disenangi oleh Syahrir itu.

Perlu juga mengatakan sesuatu di sini mengenai gaya politik dan kecendekiaan Syahrir.

Ia tidak mengelakkan konfrontasi. Ia kerap kali terang-terangan pedas dalam menghukum apa yang pada hematnya adalah tindakan-tindakan kebdohan atau pengecut. Ia tidak merahasiakan keengganannya membesar-besarkan dan mendewa-dewakan negara, termasuk negara Indonesia. Sebab baginya, negara bukanlah suatu tujuan pada dirinya, melainkan suatu ekspresi dan alat dari kedaulatan rakyat. Ia melihat negara sebagai sebuah alat paling penting bagi mencapai tujuan-tujuan lain dari revolusi yaitu kebebasan, keadilan sosial dan hak-hak azasi.

Semua itu, begitu juga keberanian pribadi dan politiknya yang kentara, membuat dia dikagumi dan menjadi tumpuan kebaktian menyala-nyala oleh banyak orang, khususnya di kalangan generasi muda. Pada waktu bersamaan, semua itu juga membuat dia dimusuhi lama oleh orang-orang lain. Di samping kandungan mendalam perasaan-perasaan ini terdapat pula kenyataan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) memandang berlanjutnya eksistensi Partai Sosialis Indonesia (PSI) sebagai suatu ancaman bagi perkembangan politik PKI sendiri. Karena itu PSI dengan segala upaya dan biaya harus disingkirkan dan dalam hal itu kaum komunis berhasil adanya.

Dengan bertambahnya jumlah telaah-telaah sejarah dan memoar pribadi oleh para peserta yang kini diterbitkan, maka catatan sejarah pasti akan menjadi lebih jelas dan banyak dari kontroversi niscaya akan hilang. Hal ini juga akan menampilkan lebih terang makna jangka panjang Syahrir sebagai seorang perumus dan pembela dari jenis nilai-nilai politik yang tidak dapat ditiadakan bagi tercapainya tujuan Indonesia mengenai suatu masyarakat yang demokratis.

Presiden Soekarno pastilah sadar akan hal ini, begitu juga akan sifat politis dari tuduhan-tuduhan terhadap Syahrir tatkala menerima berita kematian Syahrir, maka Soekarno dengan resmi lalu menyatakan Syahrir sebagai Pahlawan Nasional.

Makna "Renungan Syahrir" terletak dalam gambaran yang muncul dari kumpulan surat yang disunting oleh isterinya pada masa itu Maria Duchateau.

Syahrir muncul di sini sebagai seorang budayawan agung, yang tidak hanya menaruh perhatian terhadap politik sebagai persiapan, pembentukan dan pelaksanaan kekuasaan, tetapi juga sama banyaknya, jika tidak lebih, terhadap nilai-nilai politik dan budaya yang mengalasi serta mengasuh suatu sistem politik. Nilai-nilai ini sudah menampakkan dirinya sendiri dalam cara Syahrir memandang situasi kehidupannya, reaksinya terhadap penerungkuannya sendiri, terhadap kehidupan dalam masyarakat orang-orang buangan.

Pengamatan-pengamatannya mengenai kaitan antara fascisme dengan mentalitas kolonial masih terus mengena, bahkan dewasa ini. Ia juga menjelaskan pendiriannya tentang isu hangat pada masa itu yakni kooperasi atau non-kooperasi dengan pemerintah jajahan. Akan tetapi buku ini memperlihatkan suatu ragam intelektual yang bahkan lebih luas, mengenai minat kesusasteraan dan filsafat yang mendalam dan suatu kematangan luar biasa, begitu juga suatu visi yang lebar.

Syahrir menulis tentang hilangnya kepercayaan diri sendiri orang-orang di Eropah yang mempunyai keterikatan jiwa kepada demokrasi, dan mengenai serangan budaya dan politik dari fascisme terhadap semua itu. Walaupun nyata ini bukanlah sebuah buku politik, ulasan-ulasannya memperlihatkan kesadarannya yang pekat mengenai Perang Pasifik yang bakal datang beserta implikasi-implikasi ideologisnya. Sepanjang buku ini orang terkesan oleh pengambilan jarak intelektual dan semangat moderasi yang berprinsip sebagaimana diutarakan oleh pikiran-pikirannya. Hal ini terlebih-lebih mentercengangkan, apabila orang sadar bahwa pada masa menulis itu, Syahrir barulah seorang muda yang berusia dua puluh tahunan tengah.

Akan tetapi terdapat sebuah perkecualian terhadap sikapnya yang umumnya toleran itu. Ia putus asa dan tidak sabar dengan kejahilan dan keterbelakangan yang dilihatnya dalam banyak kebudayaan tradisional negeri ini, dan dia menghukum sebab-musababnya. Penghayatannya dalam kebudayaan Barat dan kekagumannya terhadap dinamikanya, semakin mempertegas jarak kultural yang kerap dirasakannya terhadap rakyatnya sendiri, walaupun mendalam komitmen politiknya terhadap rakyat itu.

Banyak yang telah diperkatakan mengenai hal ini, baik oleh pengeritik luarnegeri, maupun pengeritik dalam negeri. Akan tetapi dalam hal ini, Syahrir sangat mirip dengan Jawaharlal Nehru yang surat-suratnya kepada puterinya Indira, yang ditulis di dalam penjara, memperlihatkan nalar keterasingan atau alienasi yang serupa. Sekarang kita menginsafi adapun jenis alienasi demikian merupakan sebuah masalah bagi hampir seluruh generasi pertama orang-orang Asia yang telah belajar di Eropah pada kurun 1920an dan 1930an. Alienasi itu lenyap dengan bangkitnya generasi-generasi berikut yang kepercayaan diri mereka sendiri dan kebanggaan adalah berakar dalam nalar kemerdekaan nasional mereka.

Akan tetapi lebih dari 40 tahun kemudian, kita juga menjadi sadar bahwa jenis alienasi demikian hanyalah sebuah kasus istimewa dari masalah yang lebih umum dan bersifat berkesinambungan dari sosialisasi politik generasi-generasi yang lebih muda dalam masyarakat-masyarakat kita yang dengan pesat sedang berubah. Pada waktu bersamaan dapat dipersoalkan bahwa sejarah, lebih banyak daripada tidak, adalah dibuat oleh orang-orang marginal, yang berada di pinggiran, yang tidak berbagi dengan semua nilai yang berlaku, ketakutan-ketakutan dan purbasangka-purbasangka orang-orang sezaman mereka.

Dalam karir politiknya yang pendek dan cepat mencuat ke atas, Syahrir dalam banyak hal telah memperlihatkan berada di luar bentukan lazim para pemimpin gerakan kebangsaan masa itu. Mungkin inilah alasan bagi banyak cara yang berbeda-beda orang menafsirkan kebijaksanaan-kebijaksanaannya serta dorongan-dorongannya.

Walaupun demikian, tidak dapat disangkal, Syahrir telah meninggalkan jejak yang tidak terhapuskan terhadap revolusi Indonesia dan terhadap budaya politik Indonesia yang sedang muncul ke atas. Buku yang jernih, menelusuri, ber wawasan penuh dan sering mengharukan ini memperlihatkan betapa/masih relevannya nilai-nilai yang diamalkan oleh Syahrir bagi situasi kita dewasa ini.

Soedjatmoko

Jakarta, 1 Februari 1988